

BERITA FOTO

FRAKSI PKS

DPR RI



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA



fraksi.pks.id



Fraksi PKS DPR RI



fraksipksdprri



@fpksdprri



PKS TV DPR RI

Fraksi PKS DPR RI



**Jakarta dilanda
Banjir, Relawan
PKS kembali
Bergerak**

Jakarta Relawan PKS bergerak cepat membantu warga yang terdampak banjir di beberapa titik di Jakarta. Dari dapur umum hingga terjun langsung.

#PKSSiagaBanjir
#BersamaMelayaniRakyat
#PKSPelayananRakyat #PKS



Dr. H.M. Hidayat Nur Wahid, M.A



Serap Aspirasi di Masa Reses

Jakarta (19/02) — Anggota Fraksi PKS DPR RI Hidayat Nurwahid mengisi waktu reses di dapilnya antara lain, serap aspirasi FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama), DMI (Dewan Masjid Indonesia).



Dr. H.M. Hidayat Nur Wahid, M.A



**Serahkan
bantuan bagi
terdampak
Banjir**

Jakarta (19/02) — Tim Sosial dari Anggota Fraksi PKS DPR RI Hidayat Nurwahid bergerak cepat saat banjir beberapa waktu lalu, dan menyalurkan bantuan bagi warga terdampak banjir antara lain di daerah pesangrahan, serta Kebayoran Lama,



Dr. H. Jazuli Juwaini, MA



BKSAP Day di Kota Depok

Anggota BKSAP DPR RI Jazuli Juwaini saat sesi foto bersama Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI dalam acara BKSAP Day di Kota Depok, Jawa Barat, Sabtu (13/2/2021).

Dr. H. Jazuli Juwaini, MA



**Jumat berkah,
Belanja
keperluan dapur
gratis Bagi
warga di dapil**

Banten (19/02) — Dalam rangka untuk terus bergerak melayani rakyat, Tim Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini adakan kegiatan berupa gerakan Jumat berkah, berupa belanja dapur gratis, bagi warga kurang mampu di daerah pemilihannya.

Dr. H. Jazuli Juwaini, MA



**Sampaikan
khutbah Jumat
di Masjid
Baiturrahman
Komplek DPR**

Senayan (19/02) — Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini berkesempatan memberikan khutbah Jumat dihadapan jamaah Shalat Jumat di Masjid Baiturrahman, Komplek Parlemen DPR/MPR Senayan Jakarta Jumat 19 Februari 2021.



Dr. H. Jazuli Juwaini, MA



Hadiri Pelantikan Pengurus PKS Kota Serang

Serang (19/02) — Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini hadir dalam pelantikan pengurus PKS Kota Serang yang terdiri dari struktur MPD (Majelis Pertimbangan Daerah), DPD (Dewan Pengurus Daerah), dan DED (Dewan Etik Daerah), pada Sabtu 20 Februari 2020.



Habib Aboe Bakar Alhabsyi



**Pelantikan
Pengurus MPW
dan DPW
Maluku Utara,
Papua, dan
Papua Barat**

Jakarta (19/02) — Sekretaris Jenderal DPP PKS Habib Aboebakar Alhabsyi melantik secara virtual pengurus MPW dan DPW PKS Maluku Utara, Papua dan Papua Barat pada Sabtu 20 Februari 2021.

Habib Aboe Bakar Alhabsyi



Kunjungan ke sejumlah mitra kerja di wilayah DKI Jakarta

Jakarta (18/02) --- Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Aboebakar Al-Habsyi, bersama Anggota Komisi III lainnya mengunjungi sejumlah mitra kerja di wilayah DKI Jakarta, Kamis, (18/02).

"Hari ini Komisi III melakukan Kunler ke mitra kerja yang ada di wilayah DKI Jakarta. Hari pertama ini Komisi III mendatangi Lapas Cipinang, Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta dan Kejati DKI Jakarta," ungkap pria yang akrab disapa Habib Aboe ini.

Habib Aboe menambahkan, agenda utama kunjungannya adalah monitoring dan evaluasi kinerja mitra kerja. Selain itu, imbuhnya, pihaknya juga memetakan kendala-kendala yang dihadapi dalam

menjalankan tugasnya.

"Hal yang menjadi atensi utama saya adalah soal peredaran narkoba di lapas dan peredaran narkoba yang dikendalikan di Lapas. Misalkan saja di lapas cipinang, dalam beberapa waktu terakhir menjadi atensi masyarakat, karena adanya dugaan pengendalian peredaran Narkoba dari dalam lapas Cipinang," terangnya.

Misalkan saja, kata Habib Aboe, akhir tahun kemarin Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat mengungkap kasus peredaran narkoba jenis sabu-sabu dengan modus tangki bensin mobil.



Habib Aboe Bakar Alhabsyi



Kunker Komisi III Polda Metro dan Badan Narkotika Provinsi DKI Jakarta

Jakarta (19/02) --- Hari kedua kunjungan kerja (Kunker) Komisi III DPR RI ke DKI Jakarta, bertemu dengan Polda Metro dan Badan Narkotika Provinsi (BNP) DKI Jakarta.

Saat melakukan pertemuan di Polda Metro, Jakarta, Jumat (19/2), Anggota Komisi Hukum DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS), Aboe Bakar Alhabsyi menanyakan soal 'polisi nakal', serta prosedur penanganan perkara yang banyak dikeluhkan masyarakat.

Apalagi, ungkap Habib Aboebakar sapaan Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI itu, pada tahun kemarin ada 45 personel Polda Metro yang diberhentikan dengan tidak hormat.

Angka ini, menurut dia, naik 13% dari sebelumnya.

"Artinya jumlah oknum 'polisi nakal' di Jakarta bertambah tahun ini. Seharusnya Polda memiliki langkah antisipatif untuk mencegah adanya oknum nakal dalam menjalankan tugasnya. Perlu dilakukan pembinaan mental dan mekanisme pengawasan yang ketat agar tidak ada oknum nakal lagi," ujarnya.

Habib Aboebakar menyampaikan ini karena banyaknya keluhan dari masyarakat yang menceritakan bahwa mereka sangat sulit mendapatkan akses untuk menemui atau memberikan pendampingan hukum, utamanya kalau kasus aksi demonstrasi.



Drs. H. Adang Daradjatun



Kegiatan Sosial di daerah Banjir Rawa Buaya

Jakarta (22/02) - Adang Daradjatun, Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil DKI Jakarta III melakukan kegiatan sosial dengan menyalurkan bantuan bagi warga terdampak banjir di Jalan Pulo Nangka 1 Rt 03 RW 02 Kelurahan Rawa Buaya Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat pada Senin 22 Februari 2021.



H. Syahrul Aidi Maazat, Lc., M.A



Reses ke Kabupaten Kampar

Riau (19/02) — Anggota Fraksi PKS DPR RI Syahrul Aidi Maazat Dapil Riau melakukan kunjungan kerja di masa reses-nya ke Kabupaten Kampar Provinsi Riau pada Kamis 18 Februari 2021 lalu.



H. Rofik Hananto, S.E.



Silaturahmi bersama komunitas pengusaha profesional (Genpro)

Purbalingga (19/02) --- Anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Rofik Hananto hadir dalam acara silaturahmi bersama komunitas pengusaha profesional (Genpro) Pusat pada Kamis (18/02/2021) di Aula Rumah Berdaya Purbalingga, Jawa Tengah.

Dalam acara silaturahmi ini, diisi juga dengan diskusi mengambil tema Optimalisasi Peran Struktur, Anggota Dewan dan Kepala Daerah dalam Pemberdayaan UMKM.

Kegiatan tersebut, dihadiri oleh Pengurus Genpro Pusat, Ketua BPJE DPW PKS Jawa Tengah Agung Budi Margono, pengurus DPD dan Ang-

gota DPRD fraksi PKS dari Purbalingga dan sekitarnya dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

Rofik yang juga merupakan Ketua Bidang Pemberdayaan Jaringan Usaha dan Ekonomi Kader (BPJE) DPP PKS menilai perlu adanya gebrakan agar bagaimana lintas generasi mengetahui ide-ide besar Genpro.

"Dibutuhkan sebuah gebrakan bagaimana lintas generasi, minimal mendengar dan tahu ide-ide besar GENPRO ini. Masalah nanti bisa diimplementasi semua atau ada devia-



H. Rofik Hananto, S.E.



Sosialisasi di Daerah Pemilihan (Sosdapi) di Kabupaten Purbalingga

Purbalingga (21/02) — Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Dapil Jawa Tengah VII Rofik Hananto melakukan sosialisasi di Daerah Pemilihan (Sosdapi) di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah..

Acara ini dilaksanakan di Aula Balai Desa Jatisaba, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga dan dihadiri oleh Anggota DPRD Kab. Purbalingga Fraksi PKS Aris Widiarso, Camat Purbalingga Raharjo Minulyo, Kepala Desa Jatisaba Endah Herni Utari, Sekretaris DPD PKS Purbalingga Misyono, Ketua DED DPD PKS Purbalingga Afiq Yunan A., Para tokoh masyarakat dan pemuda Desa

Jatisaba, pada Jumat (19/02).

Kegiatan ini salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap Pancasila, Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan Ketetapan MPR.

"Sosialisasi 4 pilar Kebangsaan ini untuk memberikan pemahaman kepada seluruh masyarakat. Karena 4 pilar ini sangat penting untuk kehidupan berbangsa dan bernegara," kata Rofik.



Hj. Nur Azizah Tamhid, B.A.,M.A



Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI ke Kabupaten Serang Banten

Serang – Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PKS, Hj. Nur Azizah Tamhid, B.A., M.A., apresiasi Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah akan melibatkan perangkat Kecamatan, Desa hingga RT dan RW untuk perbaikan DTKS. Menurutnya, dalam pendataan ini tidak boleh sembarangan, harus melibatkan perangkat yang paling dekat dan lebih memahami kondisi masyarakat, seperti RT dan RW serta dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. Hal itu disampaikan Nur Azizah saat ditemui di Pendopo Kabupaten Serang pada Senin (15/2), dalam agenda Kunjungan Kerja Anggota Komisi VIII DPR RI ke Kabupaten Serang.

Di hadapan Anggota Komisi VIII DPR RI, Tatu menyebutkan bahwa ia telah mengusulkan kepada kemensos agar ada pendataan ulang yang akurat terkait hiruk pikuk masalah DTKS. “Selama ini kami mengacu pada BPS, namun mungkin karena keterbatasan personel di BPS, kami lihat data-data itu kurang akurat. Dalam pendataan, sebagai Pemda karena kami punya infrastruktur kebawah, ada Camat, Kades, RW dan RT, rasanya kalau salah pun tidak akan terlalu signifikan. Untuk mengantisipasi pendataan yang subjektif, kami juga akan melibatkan Babinsa dan Babinkamtibas untuk terus mengawal” jelas Tatu.



Hj. Nur Azizah Tamhid, B.A.,M.A



Reses di Gor Candrabraga Kota Bekasi



Bekasi (22/02) --- Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Nur Azizah Tamhid, mendorong Pemerintah Kota Bekasi segera memperbaiki Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang menjadi data rujukan dalam pemberian bantuan sosial (Bansos) kepada masyarakat tidak mampu.

Menurut Nur Azizah, hal itu penting untuk segera dilakukan, pasalnya di masa pandemi angka kemiskinan meningkat karena banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaannya.

Hal tersebut disampaikan Nur Azizah pada Jumat (19/02/2021) dalam agenda Reses ke-1 Anggota DPR RI Masa Persidangan Ke-3 Tahun 2020-2021 di Gor Candrabraga Kota

Bekasi.

Dalam kegiatan ini turut dihadiri oleh Walikota Bekasi Rahmat Effendi, Perwakilan Dinas Sosial serta para Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Kota Bekasi.

Dalam kesempatan ini, Nur Azizah turut mensosialisasikan terkait SKB tiga Menteri yang dikeluarkan bulan Juli 2020, berdasarkan keputusan Menteri Keuangan, Menteri Sosial dan Menteri Dalam Negeri, tentang Dukungan Percepatan Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) oleh Pemerintah Kabupaten dan Kota.

"Adanya SKB 3 Menteri ini merupakan perintah kepada jajaran pemerintah kota dan kabupaten yang di tahun 2021 ini harus segera

melakukan perbaikan DTKS. Dimana permasalahan DTKS ini terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia. Semua Anggota Komisi VIII DPR RI yang berjumlah 54 orang, saat reses dan kumpul selalu mendapatkan aduan terakir carut-marut DTKS di dapilnya", papar Nur Azizah.

Nur Azizah sebagai anggota dewan dalam menjalankan tugasnya untuk melakukan pengawasan, mengajak pemerintah kota dan kabupaten, khususnya Pemerintah Kota Bekasi dan Depok yang menjadi Dapil Nur Azizah, agar bersama-sama Dinas Sosial, pimpinan di setiap Kecamatan, Kelurahan hingga RT dan RW untuk sama-sama berkomitmen mensukseskan perbaikan DTKS ini.

H. Johan Rosihan, S.T.



Tinjau pelaksanaan budidaya ikan kerapu di Kampung Serangan, Bali



Denpasar (17/02) --- Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Johan Rosihan, melakukan kunjungan kerja pada masa reses bersama sejumlah Anggota Komisi IV lainnya untuk meninjau pelaksanaan budidaya ikan kerapu di Kampung Serangan, Kota Denpasar Bali, Senin, (15/02/2021).

Johan melihat budidaya ikan kerapu ini selaras dengan program terobosan dari Menteri Kelautan dan Perikanan yang ingin menggerakkan perikanan budidaya untuk menghidupkan perekonomian rakyat yang didukung oleh Badan Riset perikanan kelautan untuk menjaga keberlangsungan sumberdaya kita.

"Saya mendorong KKP untuk selalu memfasilitasi masyarakat nelayan atas inisiatif mereka karena melihat potensi sumberdaya laut yang mereka miliki untuk melakukan kegiatan budidaya kerapu persilangan ini," ujar Johan.

Politisi PKS ini berharap untuk mewujudkan terobosan itu, KKP segera menyiapkan strategic planning dengan menjadikan inisiatif baik dari masyarakat nelayan ini sebagai daya unguhnya.

"Agar budidaya ikan kerapu terus berkembang dan akan berdampak pada peningkatan produksi perikanan budidaya serta mampu memperbaiki nilai tukar nelayan untuk peningkatan



kesejahteraan para pembudidaya ikan kerapu ini," tutur Johan.

Wakil rakyat dari Pulau Sumbawa ini melihat ikan kerapu merupakan salah satu jenis ikan yang memiliki nilai ekonomis tinggi dan banyak diminati nelayan untuk dibudidayakan di berbagai perairan laut Indonesia.

H. Johan Rosihan, S.T.



Serap aspirasi para petambak dan ibu-ibu pencari kerang



NTB (21/02) — Di dampingi isteri, Anggota Komisi IV Johan Rosihan mengunjungi dan menyerap aspirasi para petambak dan ibu-ibu pencari kerang di Desa Mbawi, Kabupaten Dompu. (21/02/2022)

Kepala desa yang ikut mendampingi menjelaskan bahwa masyarakatnya sangat membutuhkan

akses jalan menuju tambak juga bantuan sarpras berupa mesin air, jaring dan sebagainya demi menunjang aktivitas mereka sehari-hari.

Dalam sambutannya, Anggota DPR Dapil NTB I Pulau Sumbawa itu menjelaskan akan berusaha membantu semaksimal mungkin

sesuai tupoksi dan kapasitasnya sebagai wakil rakyat. "Silahkan buat kelompok resmi. Insya Allah saya akan bantu semaksimal mungkin. Mohon doakan saya supaya tetap sehat, sehingga kita bisa berkumpul kembali seperti ini di waktu lain." Pangkasnya.

H. Johan Rosihan, S.T



Mengunjungi pabrik tahu di Desa Kenanga, Bolo, Kabupaten Bima.

Bima, NTB (20/02) – Johan Rosihan, Anggota Komisi IV DPR RI Daerah pemilihan NTB mengisi masa resesnya dengan mengunjungi pabrik tahu milik Pak Yos yang terletak di Desa Kenanga, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima. Nusa Tenggara Barat. pada Sabtu, 20 Februari 2021.

Pak Yos, pengusaha tahu mengungkapkan tentang betapa sulitnya mendapatkan Kedelai sebagai bahan baku pembuatan tahu. Ia harus membeli kedelai

impor dengan harga yang sedikit lebih mahal.

Dengan kondisi sulit yang dihadapi para pengusaha tahu memperoleh bahan baku kedelai. Johan berharap pemerintah bisa hadir melalui kebijakan 2 terukur dan menyasar ikm2 kita di daerah, terutama yang menyangkut sektor real. pungkasnya.



Ir.H.A. Junaidi Auly, M.M.



Serap Aspirasi dengan masyarakat Desa Adiwarno

Lampung Timur (21/2) — Ahmad Junaidi Auly, Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Lampung II) mengisi saat resesnya dengan melakukan Silaturahmi dan Serap Aspirasi dengan masyarakat Desa Adiwarno, Batanghari, Lampung Timur. pada Ahad, 21/2/2021.

Dalam pertemuan tersebut, warga menyampaikan aspirasinya terkait bantuan tunai pemerintah yang tidak merata, pupuk subsidi untuk pertanian dan bantuan pemerintah dalam hal pertanian dan peternakan



H. Mahfudz Abdurrahman, S.Sos



Reses, Kunjungi sejumlah tempat di Kota Bekasi

Bekasi (16/02) --- Anggota DPR RI Fraksi PKS Mahfudz Abdurrahman mengunjungi sejumlah titik di Kota Bekasi, Selasa (16/02/2021).

Politisi Dapil 6 Jawa Barat yang juga petinggi PKS ini pun memberikan bantuan penanganan COVID-19 dan korban banjir.

Pada kesempatan ini Mahfudz Abdurrahman mengunjungi titik awal di Yayasan Masjid Daruttaubah dan lingkungan Kel. Harapan Jaya Kec. Bekasi Utara.

Mahfudz Abdurrahman menyampaikan bahwa kegiatan Reses ini merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh Anggota Dewan, hal ini mengacu pada Undang-Undang.

"Saat ini masuk masa reses, di DPR tidak ada agenda-agenda rapat, maka reses dilakukan agar Anggota Dewan bisa lebih dekat dengan masyarakat, sekaligus menyerap aspirasi masyarakat. Sebenarnya hal ini (reses) merupakan agenda wajib Anggota Dewan manapun" ucapnya.

Hanya saja menurut Mahfudz Abdurrahman reses saat ini berbeda seperti kondisi sebelumnya, wabah Corona yang melanda merubah semuanya.

Reses yang jumlahnya terbatas juga senantiasa harus menerapkan protap kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah, dan hal ini bagian dari ikhtiar kita melindungi diri dari wabah virus COVID-19.

"Reses sekarang karena di masa pandemi COVID-19, jadi semua dibatasi, mulai tidak mengumpulkan banyak orang, dan tentunya juga wajib menerapkan protap kesehatan yang sudah ditentukan" sambungnya.

Selanjutnya Mahfudz Abdurrahman berdialog mengenai kondisi yang di alami bangsa saat ini dan berdampak hingga ke masyarakat bawah. Mulai dari wabah COVID-19 hingga musibah banjir yang saat ini menimpa negeri Indonesia.

Dr. H. Mulyanto, M.Eng



Memberi sambutan dalam Sosialisasi Tugas dan Fungsi BPH Migas

Tangerang (18/02) — Dr.H. Mulyanto, M.Eng. anggota Komisi VII DPR RI fraksi PKS dari Dapil Banten III, yang meliputi Kota Tangerang, Kota Tangsel dan Kabupaten Tangerang, yang akrab disapa Pak MUL, hadir memberi sambutan dalam acara Sosialisasi Tugas dan Fungsi BPH Migas di Ciledug, Kota Tangerang, Banten 18/2/2021.

Dalam kesempatan tersebut hadir Komisioner BPH Migas M. Ibnu Fajar, Sekretaris BPH Migas, dan Staf Ahli Walikota Tangerang, Banten.

Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, mendesak BPH Migas untuk meningkatkan kinerja pengawasan, terutama terhadap BBM bersubsidi yang menjadi

tanggung-jawabnya.

Mulyanto juga meminta BPH Migas mempercepat implementasi sistem digitalisasi nozel SPBU yang akan dioperasikan Pertamina. Tujuannya agar pengawasan penyaluran BBM lebih akurat, sehingga volume BBM bersubsidi yang dibayar oleh pemerintah benar-benar tepat, karena didasarkan pada volume BBM yang keluar dari nozel SPBU, bukan pada titik transportasi atau depo BBM.



Dr.H. Mulyanto, M.Eng



Bersama Masyarakat di Gunung Kaler

Gunung Kaler (13/2) — Dr.H. Mulyanto, M.Eng. anggota Komisi VII DPR RI fraksi PKS dari Dapil Banten III, yang meliputi Kota Tangerang, Kota Tangsel dan Kabupaten Tangerang, yang akrab disapa Pak MUL, turut prihatin atas musibah banjir yang terjadi di Kecamatan Gunung Kaler, Kabupaten Tangerang, 13/2/2021.

Dalam kesempatan ini, Tim Pak MUL turun menyerahkan bantuan melalui Ketua DPC PKS Kecamatan Gunung Kaler serta berdialog dengan warga terdampak.

Karenanya, Pak MUL mendorong Pemerintah Daerah untuk secara tegas mengawasi pembangunan perumahan-

perumahan baru, agar tidak mengganggu tempat-tempat penampungan air, resapan air, dan pohon-pohon besar, termasuk juga pengelolaan gorong-gorong atau selokan-selokan. Agar air mudah terserap oleh tanah dan sebagian mengalir dengan baik. Lalu, masyarakat akan menuai keberkahan bagi lingkungan: berupa daerah yang hijau, sejuk dan bebas banjir.

Akhirnya, semoga bantuan yang sedikit dari kami ini bermanfaat bagi masyarakat di tengah kondisi pandemi yang belum juga usai. Aamin3X yaa rabball'alamiin.



Dr.H. Mulyanto, M.Eng



Salurkan bantuan di 13 titik lokasi banjir di 11 kecamatan se-Tangerang Raya

Jakarta (21/02) --- Untuk mengantisipasi berbagai kejadian akibat banjir, Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto, minta PLN menyiapkan tim siaga banjir.

Menurut Mulyanto, tim PLN harus siap 24 jam melayani masyarakat yang memerlukan bantuan terkait pengadaan maupun pemadaman listrik.

"Jangan sampai dalam kondisi banjir seperti sekarang terjadi musibah susulan akibat aliran listrik liar atau korsleting listrik," kata Mulyanto.

PLN, imbuhnya, perlu menyiapkan tim khusus untuk melakukan siaga banjir dengan mematikan listrik di wilayah terdampak banjir.

"Sehingga tidak menimbulkan bahaya kelistrikan, karena stop kontak aktif di dalam rumah-rumah yang terendam air. Namun demikian, setelah air surut dan aman dapat segera dinyalakan kembali," kata Mulyanto usai memberikan bantuan sosial di 13 titik lokasi banjir di 11 kecamatan se-Tangerang Raya, Sabtu (20/02/2021).

Selain itu Mulyanto juga minta kepada Pemerintah agar memperpanjang stimulus listrik yang rencananya akan berakhir Maret 2021.

Mulyanto menilai pandemi Covid-19 belum reda, ekonomi masyarakat belum pulih benar, karena itu upaya yang sudah baik dari Pemerintah cq. PLN dalam meringankan beban masyarakat terkait pembebasan dan diskon listrik untuk masyarakat ini penting untuk diteruskan.

H. Nurhasan Zaidi, S.Sos.I



Hadiri Peresmian ATM Beras



Majalengka (18/02) --- Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Nurhasan Zaidi bersama Ketua Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan Bupati Majalengka menghadiri acara Peresmian Program Kemaslahatan BPKH berupa pemasangan Instalasi Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Beras di Masjid Pusaka Perguruan Darul Uluum PUI Majalengka, Kamis (18/02).

Dalam sambutannya Nurhasan Zaidi mengungkapkan Apresiasi atas terealisirnya program ATM Beras perdana di Majalengka ini.

"Saya atas nama Anggota DPR RI Komisi VIII sekaligus Ketua Umum DPP PUI memberikan Apresiasi kepada BPKH dan Rumah Zakat. Ini

sebuah kerja besar, sinergitas yang positif, Insyaallah semoga dapat bermanfaat dan dan memberikan maslahat bagi masyarakat", ujarnya.

Nurhasan juga mengungkapkan harapannya agar BPKH terus konsisten bekerja dengan profesionalismenya menjaga amanah pengelolaan dana haji umat dan mengoptimalkan nilai manfaat pengelolaan dana tersebut untuk sebesar-besarnya kemaslahatan umat.

Sementara itu, Ketua BPKH, Anggito Abimanyu, mengatakan bahwa ATM Beras ini diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya memakmurkan masyarakat yang berbasis masjid dimana kemanfaatannya bisa memberikan akses ke-

butuhan pangan untuk 200 penerima manfaat atau sekitar 50 KK.

"Alhamdulillah hari ini kita mendapat inspirasi dan bisa kita realisasikan, yakni untuk pertama kalinya BPKH membuat program penguatan ekonomi umat melalui ATM Beras. Terimakasih kepada Perguruan Darul Uluum PUI yang bersedia bersinergi dan Rumah Zakat yang telah menginisiasi pembuatan ATM Beras berbasis masjid pertama di Majalengka", ungkapnya.

Hj. Nevi Zuairina



Hadiri Serah Terima Jabatan Gubernur Sumatera Barat



Padang (17/02) --- Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Nevi Zuairina menghadiri serah terima jabatan Gubernur Sumatera Barat dari Irwan Prayitno kepada Sekda Provinsi Sumatera Barat Alwis di Auditorium Gubernur Sumbar, Jumat (12/2/2021). Sertijab juga disaksikan oleh Ketua DPRD Sumbar Supardi.

Nevi mengatakan proses sertijab ini tidak langsung kepada Gubernur terpilih pada pilkada 9 desember 2020 lalu, dikarenakan hasil pilkada kita masih berproses di Mahkamah Konstitusi. Akibatnya terjadi kekosongan di pimpinan tertinggi Sumatera Barat sesuai waktu yang seharusnya berakhirnya kepemimpinan Bapak Irwan

Prayitno.

"Karena ada kekosongan, maka kemendagri menugaskan sekda sebagai Pelaksana harian Gubernur hingga Gubernur Sumbar hasil Pilkada 2020 dilantik", ujar politisi PKS ini.

Sebagai anggota DPR RI yang juga istri mantan Gubernur Sumbar ini, Nevi menjelaskan bahwa bapak irwan tidak akan istirahat untuk bergerak dalam aktivitasnya. Mungkin orang akan melihat bahwa bapak Irwan istirahat sementara dari dunia politik. Tapi Sesungguhnya konsep Istirahat yang dianut adalah, merubah satu aktivitas kepada aktivitas lainnya.

"Bapak Irwan itu Akademisi,

Praktisi sekaligus Politisi. Memiliki latarbelakang sebagai dosen, ia akan kembali menjadi guru besar di Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Bahkan Alhamdulillah pada tanggal 15 Februari 2021 Beliau di anugrahi sebagai Guru Besar Luar Biasa oleh Universitas Negeri Padang", urai Nevi.

Politisi PKS ini mengatakan, bahwa saat ini di struktur kepartaian, bapak Irwan masih menjadi anggota Majelis Pertimbangan Partai (MPP) PKS di tingkat pusat. Ketika PKS memerintahkan beliau untuk terjun kembali di dunia Politik, tentunya sebagai kader ia akan mendengar dan taat.

Hj. Nevi Zuairina



Bertemu Pengusaha dan Dukung Pengembangan Jiwa Wirausaha

Kota Pariaman (19/02) --- Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Nevi Zuairina, saat reses DPR RI masa sidang III Tahun sidang 2020 - 2021 mulai merealisasikan program Pengembangan UMKM di daerah pilihannya.

Kali ini, Nevi mendukung penumbuhan jiwa wirausaha berbasis nagari yang dimulai dari Desa Air Santok, Kecamatan Pariaman Timur, Kota Pariaman

"Salah satu hal yang nyata dapat dilakukan di lapangan adalah membantu masyarakat membangun jiwa wirausaha. Wirausaha ini untuk dapat mencapai pemerataan di tiap lokasi harus berbasis nagari. Dengan meratanya jiwa wira usaha hingga

sampai pelosok-pelosok, diharapkan pertumbuhan ekonomi di tiap kecamatan hingga kabupaten terus progresif naik", tutur Nevi.

Legislator asal Sumatera Barat II ini mencontohkan wirausaha yang relatif dapat dilakukan secara sederhana menjual paket makanan berupa nasi dan ayam goreng.

Sebagai simulasi, Nevi menggambarkan, setiap titik usaha, keuntungan per 1 ekor ayam sebesar 20 ribu rupiah. Bila para usahawan dapat menjual sendiri sebanyak 5 ekor (sekitar 45 potong), maka dapat keuntungan 100 ribu rupiah.

"Kebutuhan akan makanan ini akan banyak diminati karena setiap hari, permintaan makanan akan



selalu ada. Mudah-mudahan dengan seriusnya para usahawan, seperti contoh menjual paket ayam goreng dan nasi dengan volume sekitar 12 ekor ayam per hari, maka mereka dapat menyimpan penghasilan sekitar 250 ribu rupiah per hari", ungkap Nevi.

Politisi PKS ini mengaku akan terus berupaya mengembangkan potensi-potensi daerah yang berbasis nagari. Setiap daerah memiliki kekhasan yang berbeda dan sumber daya yang berbeda pula. Dengan skala kecil tapi masih tiap daerah, maka perekonomian akan bergeliat masif hingga kabupaten bahkan provinsi.

Hj. Nevi Zuairina



PKS



Kunker Komisi VI DPR ke BPKN

Jakarta (21/02) --- Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PKS, Nevi Zuairina pada Kunjungan Reses Komisi VI DPR RI dengan Mitra Kerja Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) meminta BPKN meskipun dengan keterbatasan yang ada harus tetap fokus melindungi konsumen.

Saat ini, kata Nevi, terutama di masa pandemi, di masyarakat banyak melakukan pengaduan terkait sektor e-commerce seperti phishing, refund hotel, tiket pesawat hingga OTP.

Nevi mengatakan, tiga isu fundamental penguatan kelembagaan edukasi dan sosialisasi masif sinkronisasi dan kebijakan perlindungan konsumen mesti dapat terealisasi.

Penguatan kelembagaan, edukasi dan sosialisas, dan Sinkronisasi kebijakan perlindungan konsumen yang tersebar disejumlah sektor dan daerah.

"Isu kebijakan perlindungan konsumen ini mesti benar-benar dapat terealisasi di lapangan sehingga masyarakat dapat merasakan langsung akan perlindungan konsumen ini. Jangan sampai, seluruh instrumen di BPKN terjebak hanya melakukan rutinitas. Adanya pimpinan yang baru saja dilantik, semoga lembaga ini dapat melakukan terobosan inovasi kreasi untuk perlindungan konsumen", Harap Nevi.

Legislator asal Sumatera Barat II

ini menjelaskan, bahwa BPKN ini merupakan lembaga strategis dalam melayani masyarakat Indonesia. Dibawah presiden RI langsung tanggung jawabnya, BPKN harus mampu merumuskan dan merekomendasikan kebijakan perlindungan konsumen.

"Dalam hal penguatan perlindungan konsumen merata hingga daerah-daerah, BPKN juga harus melakukan harmonisasi dengan LPKSM dan BPSK. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) bertanggung jawab untuk meningkatkan literasi konsumen di tingkat daerah," papar Nevi.

Hj. Nevi Zuairina



Serahkan Bantuan Sarana untuk Masjid di Padang Pariaman

Padang Pariaman (20/02) --- Anggota DPR RI asal Sumatera Barat, Nevi Zuairina menyerahkan bantuan sarana untuk masjid berupa Sound System dan Kipas Angin pada saat reses DPR RI masa sidang III Tahun sidang 2020 - 2021.

Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk empat program andalannya di daerah pemilihan yakni memperkuat UMKM, Meningkatkan nilai-nilai religius, Kepedulian terhadap Pertanian pangan dan Memperkokoh ketahanan keluarga.

Lokasi kali ini yang diberikan bantuan oleh politisi PKS ini adalah Masjid Kalampaian yang berlokasi di Nagari Nanpanjang Selatan,

Kecamatan VII Koto, Kabupaten Padang Pariaman.

"Alhamdulillah terus diberikan kemampuan dan kekuatan untuk berkontribusi kepada umat ya. Semoga sarana masjid ini semakin memperkuat nilai-nilai religius dan kenyamanan dalam beribadah", tutur Nevi.

Selain memberikan bantuan sound dan kipas, Bundo Nevi sapaan akrabnya, juga memberikan sejumlah bantuan untuk keperluan renovasi ruang serba guna mesjid.

"Dengan tujuan ruang serba guna ini dapat dipakai kegiatan-kegiatan yang banyak sekali pemanfaatannya mulai belajar-

mengajar hingga dapat pula untuk keperluan pernikahan maupun hajjat lainnya", ungkapnya.

Legislator Dapil Sumbang II ini mengatakan, Pada dasarnya masyarakat Indonesia ini sangat religius. Khusus untuk daerah Sumatera Barat, bahkan telah menyatu dengan adat-istiadatnya. Tersirat dan tersurat dari falsafah dasar adat Minangkabau yang berbunyi 'adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah

KH. Buchori, Lc., M.A.



Kunker Komisi VIII Ke Jawa Tengah

Jawa Tengah (15/02) – Anggota Komisi VIII DPR RI Dapil Jawa tengah I Bukhori Yusuf melakukan Kunjungan kerja bersama rombongan komisi VIII DPR RI ke Daerah Jawa Tengah pada 15-16 Febuari 2021)

Hari pertama berkunjung ke pemerintahan provinsi Jawa Tengah diterima langsung gubernur Jawa Tengah ganjar Pranowo. Dalam kunjungan tersebut DPR RI memberikan sejumlah bantuan seperti mobil dan uang sebesar 233 juta rupiah.

Setelah dari pemprov jateng, kunjungan dilanjutkan ke kantor Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.

Kunjungan tersebut untuk menyerap aspirasi dan pengawasan khususnya membahas verifikasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang saat ini sedang dibahs di panja komisi VIII DPR RI

berikutnya, kunjungan mengarah ke kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah.

Kunjungan tersebut Bukhori Yusuf menyampaikan advokasi masyarakat berkaitan dengan Madrasah dan Pondok Pesantren. Selain itu, komisi VIII juga membahas Embarkasi Haji Jawa Tengah, Komisi VIII mendorong Kemenag Jateng untuk membuat Embarkasi Haji di daerah Semarang Raya.



KH. Buchori, Lc., M.A.



Kunker Komisi VIII Ke Tambak Lorok, Lokasi Paling Terdampak Banjir

Semarang, Jawa Tengah (15/02) – KH. Bukhori, Lc., M.A bersama Komisi VIII DPR RI mengunjungi daerah Tambak lorok Kota semarang

Tambak Lorok merupakan salah satu daerah yang terkena dampak bencana abrasi. Salah satu yang terdampak bencana rumah pak RT, dimana dapur dan kamar mandi hancur oleh air laut

Selanjutnya, Bukhori mewakili komisi VIII DPR RI bersama wakil walikota Kota Semarang membagikan bantuan sementara

berupa sembako dan keperluan rumah tangga. "kami meminta kepada pemerintah baik pemerintah pusat ataupun daerah untuk segera memberikan bantuan fisik berupa tanggul air laut" ungkap Bukhori

selain itu, Bukhori bersama wakil walikota melihat mobil dapur umum milik Badan Amil Zakat Nasional (baznas) di Tambak Lorok. "kami mengapresiasi Baznas yang memiliki mobil dapur umum yang dapat digunakan sewaktu-waktu ketika terjadi bencana", kata Bukhori



Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari



Meresmikan Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta

KBRN Surakarta: Setelah menghabiskan waktu sekitar 1 tahun proses renovasi yang menelan anggaran sekitar 6,8 M, gedung kesenian Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta akhirnya diresmikan, pada, Rabu (17/2/21) malam.

Peresmian ditandai dengan pemukulan gong, dilakukan langsung oleh Wakil Ketua Komis 1 DPR RI Abdul Kharis Almasyhari yang didampingi Direktur Utama LPP RRI Surakarta M Rohanudin.

Turut hadir dalam peresmian, Direktur Program dan Produksi RRI Soleman Yusuf, Direktur SDM dan Umum Nurhanudin, Kapusperm Widhi Kurniawan, Kepala SLN Agung Susatya, Anggota dewan pengawas

RRI Hasta Kuncara dan Dwi Hernuningsih, Kepsta RRI Surakarta Sjahbana Bahdar, dan Kepsta se-Jawa.

Peresmian itu juga diwarnai, Pemberian penghargaan kepada seniman maestro Keroncong Waljinah, Tokoh masyarakat yang konsen pada budaya mantan Walikota Surakarta FX Hadi Rudyatmo, dan Mangkunegoro VII yang memberikan hibah tanah untuk RRI surakarta.

Wakil Ketua Komis 1 DPR RI Abdul Kharis Almasyhari mengungkapkan, tingginya antusias masyarakat dan seniman di kota Surakarta dalam menikmati pertunjukan kesenian, jadi salah satu alasan pentingnya renovasi, mengingat



perlu adanya penyesuaian dalam perkembangan jaman.

"Saat tahun 2016 berkunjung ke RRI, suasana masih seperti awal pembangunan, setelah melihat animo masyarakat dan seniman antusias memanfaatkan gedung, alangkah baiknya perlu renovasi penyesuaian jaman," ungkapnya saat menyampaikan sambutan peresmian gedung Sarsito Mangunkusumo.

Maka, lanjut Wakil Ketua Komis 1, diharapkan, Gedung Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta menjadi wadah untuk aktualisasi para seniman dalam mencurahkan karya seninya sehingga dapat dinikmati masyarakat.

H. Ahmad Syaikh



Tinjau Banjir di Kabupaten Bekasi dan Berikan Bantuan

Kabupaten Bekasi (21/02) --- Presiden PKS, Ahmad Syaikh, meninjau banjir di Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Ahad (21/2). Banjir disebabkan karena tanggul Sungai Citarum yang jebol.

Kunjungan ini dilakukan usai Syaikh mendapat informasi peristiwa tersebut. Dampak yang diakibatkan oleh jebolnya tanggul tersebut sangat luas. Saat ke lokasi, Syaikh memakai motor menerobos banjir karena tidak bisa dilalui mobil.

"Saya langsung meluncur ke lokasi. Karena melihat dampaknya sangat luar biasa. Banjir besar dan banyak warga mengungsi," ujar Syaikh.

Syaikh yang juga Anggota

Komisi V DPR RI itu minta semua pihak terkait segera mencari solusi jangka pendek dan panjang. Pihak dimaksud antara lain Kementerian PUPR dan Pemerintah Kabupaten Bekasi.

"Ini perlu segera dicarikan solusinya. Jangka pendek dan panjang. Melibatkan Kementerian PUPR dan Pemerintah kabupaten Bekasi," jelas Syaikh.

Untuk membantu warga yang terkena banjir, Syaikh mendorong aparat pemerintah untuk secepatnya memberikan pasokan logistik dan tempat pengungsian yang layak.

"Pastikan warga yang terkena banjir dapat pelayanan maksimal. Berikan logistik dan tempat



mengungsi yang memadai," tegas Syaikh.

Dalam kesempatan itu, Syaikh juga memberikan bantuan kepada masyarakat dan pesantren yang terkena banjir.

"Bantuannya tidak banyak. Mudah-mudahan dapat meringankan," pungkas Syaikh.

BNPB mengatakan, akibat tanggul jebol, banjir melanda empat desa di Kabupaten Bekasi, yaitu Desa Sukaurip, Karangsegar, Bantasari, dan Sumber Urip. Keempat desa berada di Kecamatan Pebayuran. Banjir mengakibatkan 5 unit rumah hanyut, tinggi air dilaporkan mencapai 100-250 cm.

H. Ahmad Syaikh



Salurkan Bantuan Beras untuk Korban Banjir

Kabupaten Karawang (22/02) --- Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Ahmad Syaikh, menyalurkan bantuan beras di tiga Kabupaten, yakni Bekasi, Karawang dan Purwakarta. Ketiga daerah tersebut merupakan Daerah Pemilihan (Dapil) Syaikh, yakni Jawa Barat VII.

Bantuan beras untuk tiga kabupaten masing-masing sebanyak 1 ton. Diberikan kepada masyarakat yang terkena banjir dalam acara Reses Anggota DPR RI, Senin (22/02).

"Beras ini saya berikan untuk membantu masyarakat yang menjadi korban banjir di Kabupaten Bekasi, Karawang dan Purwakarta," ujar Syaikh.

Menurut Syaikh, banjir tahun

ini lebih besar dampaknya. Karena wilayah yang terendam banjir lebih luas dari sebelumnya.

"Dari informasi dan tinjauan langsung di lapangan, saya melihat banjir kali ini memang lebih berdampak besar," ungkap Syaikh.

Di Kabupaten Bekasi, berdasarkan update data Pusat Pengendalian dan Operasi (Pusdalops) Kabupaten Bekasi yang dilaporkan Pusdalops Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), hingga Sabtu (20/2/2021) pukul 11.00 WIB, sedikitnya 37 desa di 17 kecamatan terendam banjir.

Banjir juga terjadi di Kabupaten Karawang. Ada 34 desa di 15 kecamatan terdampak banjir, yakni

Kecamatan Rengasdengklok, Telukjambe Barat, Tirtajaya, Pedes, Cikampek, Purwasari, Ciampel, Pangkalan, Klari, Tempuran, Tirtamulya, Jatisari, Rawamerta, Karawang Barat, dan Cilamaya Wetan. Warga terdampak mencapai 9.331 keluarga atau 28.329 jiwa, sedangkan 1.075 keluarga atau 4.184 jiwa mengungsi.

Syaikh berharap, bantuan ini dapat bermanfaat bagi masyarakat yang menjadi korban banjir.

"Bantuan beras ini pastinya kurang banyak. Tapi semoga meringankan beban warga yang jadi korban banjir," pungkas Syaikh.

Dr. Hj. Anis Byarwati, S.Ag.,M.Si.

Jakarta (21/02) --- Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Anis Byarwati, menanggapi terkait dengan Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) yang baru-baru ini diinisiasi oleh Pemerintah.

Pada acara Webinar Nasional Seri Literasi Ekonomi dan Keuangan Islam yang diselenggarakan oleh Ikatan Alumni Pasca Sarjana Kajian Timur Tengah dan Islam, Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia (ILUNI PSKTTI SKSG UI) dan Sharia Community, Anggota Komisi XI DPR ini mengungkapkan bahwa pada Pemerintahan sebelumnya GNWU sudah mulai diperkenalkan.

"Sebenarnya Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) bukanlah sesuatu yang baru Gerakan serupa pernah diluncurkan oleh Presiden SBY pada pada 8 Januari 2010," ungkap Anis Byarwati, Sabtu (20/02).

Pada acara dengan topic "Wakaf Uang: Kenapa Ada Keramaian?" ini, Anis menegaskan bahwa dalam kurun waktu 11 tahun, sudah dua kali peluncuran GNWU dilaksanakan oleh Kepala Negara, tetapi belum terlihat ada progress yang signifikan.

"Lahirnya fatwa MUI tentang wakaf uang pada tahun 2002, merupakan tonggak sejarah dari lahirnya UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah dengan mengeluarkan PP No. 42 Tahun 2006 tentang Wakaf. Dan secara teknis diatur melalui Peraturan Menteri



Webinar Nasional Seri Literasi Ekonomi dan Keuangan Islam

Agama dan Peraturan BWI," terang Anis.

Stagnannya perkembangan wakaf, imbuhnya, juga bisa terlihat dari perkembangan regulasi yang melingkupinya. Usia UU No. 41 Tahun 2004, sudah lebih dari 16 tahun.

"Dan bisa dipastikan beberapa hal yang terkait dengan aturan pengelolaan Wakaf sudah sangat ketinggalan zaman, karena pesatnya perkembangan teknologi informasi," ujar Anis.

Menanggapi peluncuran GNWU oleh Presiden Jokowi

ditengah kondisi perekonomian nasional yang sedang mengalami resesi, Anis mengatakan, hal tersebut tentu menimbulkan banyak spekulasi bahwa wakaf yang terkumpul akan dipakai Pemerintah untuk membantu membiayai program pembangunan.

Walaupun Kementerian Keuangan dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) mengklarifikasi bahwa dana yang terkumpul dari GNWU tidak masuk ke dalam kas negara.

Dr. Hj. Anis Byarwati, S.Ag.,M.Si.



Kunjungi Lokasi Banjir, Anis Apresiasi Kerja Aparat yang Sigap Tangani Banjir

Jakarta (19/02) --- Banjir kembali menggenangi beberapa daerah di Jakarta pada Jum'at (19/02/2021). Hal ini sebagaimana prediksi BMKG sehari sebelumnya yang mengatakan akan terjadinya cuaca ekstrim di Jabodetabek pada 19-20 Februari dan mengakibatkan banjir di Jakarta.

Anggota DPR-RI dari Fraksi PKS, Anis Byarwati, langsung meninjau lokasi banjir Jumat pagi.

Legislator PKS dari Daerah Pemilihan Jakarta Timur ini menyambangi korban banjir di wilayah Cipinang Bali, tepatnya di Rw.013 Kelurahan Cipinang Muara, Jakarta Timur.

Di wilayah ini terdapat 3 Rw

yang terdampak banjir dengan ketinggian sampai pinggang orang dewasa (+- 1 meter), yaitu Rw 06, Rw 07 dan Rw 12.

Saat mengunjungi lokasi, beberapa rumah warga di pinggiran Kali Sunter masih nampak terendam air. Nampak juga para petugas yang tengah melakukan evakuasi korban banjir. Berdasarkan informasi dari aparat setempat, terdapat sekitar 200 KK terdampak banjir pada hari ini.

Selain mengunjungi lokasi pemukiman warga dan posko pengungsian korban banjir, Anis juga mengunjungi Posko Kesehatan yang terletak di Rw.013 Cipinang Muara.



Setelah berbincang dengan beberapa petugas dan masyarakat yang berada disana, Anis menilai kerja aparat dalam penanganan banjir ini cukup bagus.

Dr. Hj. Anis Byarwati, S.Ag.,M.Si



Menemui Pengungsi Banjir pada dua titik

Jakarta (22/02) --- Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, daerah pemilihan Jakarta Timur, Anis Byarwati, menemui para pengungsi Banjir pada dua titik, Ahad (21/02/2021).

Anis sempat berbincang dengan beberapa pengungsi yang menyampaikan harapan-harapannya. "Beberapa menyampaikan agar pemerintah lebih memperhatikan pembangunan di lingkungan mereka serta mencari solusi agar banjir dapat dikendalikan," ungkap Anis.

Dalam pesannya kepada para pengungsi juga, Anis menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi banjir dan berpesan agar para pengungsi bersabar

menghadapi situasi sulit ini.

"Saya dan kita semua berharap banjir segera surut dan warga dapat beraktivitas normal kembali," ujar Anis.

Anis memulai kunjungannya dengan meninjau Dapur Umum PKS yang didirikan di rumah salah satu warga di bilangan Cipinang Muara.

Di Dapur Umum PKS ini, Anis disambut oleh ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga DPC Cipinang Muara, Tisnowati. Tak hanya meninjau, Anis juga turut masuk dan berkegiatan beberapa saat di Dapur Umum ini.



Ketahui segala informasi
terkini ikhtiar politik
PKS di Parlemen



Kunjungi
**KANAL RESMI
FRAKSI PKS DPR RI**

fraksi.pks.id 



Website

fraksi.pks.id



Instagram

fraksipksdprri



Twitter

@fraksipksdprri



Facebook

Fraksi PKS DPR RI



Youtube

PKSTV DPR RI